

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL**

**Nida Rizqia Fikra**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
nida013@ummi.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode asosiatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder, cara yang digunakan adalah dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Sukabumi periode 2018-2020 dengan menggunakan sample data 36 data, dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Modal.

**Kata Kunci :** Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the Regional Original Income (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK) have a positive effect on the Sukabumi Regency Government Capital Expenditure. The research method used in study is the associative and descriptive method. The data collection technique in this research is secondary data, the method used is documentation. The sample in this study is the Budget Realization Report (LRA) of the Sukabumi Regency Government for the 2018-2020 period using 36 data samples, and using the multiple linear regression analysis method. The results of the study indicate that the Regional Original Revenue partially shows that the Regional Original Income (PAD) has a positive and significant effect on Capital Expenditures. Meanwhile, the Special Allocation Fund partially shows that the Special Allocation Fund has no significant effect on capital expenditure. And simultaneously Regional Original Revenue and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Regional Capital Expenditures.*

**Keywords:** Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Original Local Revenue

## **PENDAHULUAN**

Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan. Menentukan suatu pemerintah yang baik dilihat dari keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sujarweni, V. Wiratna (2016: 60) “APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahun disetujui oleh DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Pemerintah daerah memerlukan biaya yang salah satu sumbernya dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010). Sesuai dengan otonomi daerah, daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, tetapi kenyataannya tidak semua daerah dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan ketidak seimbangan finansial satu daerah dengan daerah lain. Sebab itu pemerintah pusat mendistribusikan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk membiayai keperluan daerah yang terdiri dari: 1. Dana Bagi Hasil (DBH), 2. Dana Alokasi Umum (DAU), dan 3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah dapat mendistribusikan pendapatan asli daerah yang didapat untuk mendanai belanja modal. Tetapi kenyataannya penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah.

Dana transfer dari pusat untuk daerah salah satunya Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 menerangkan Dana Alokasi Khusus ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berikut target Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020:

**Tabel 1.**  
**Target pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Modal**  
**Kabupaten Sukabumi Tahun 2018- 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (RP)</b>	<b>Realisasi (RP)</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2018	519.892.704.010,00	614.381.109.002,00	118,18
2019	544.806.984.317,00	603.795.033.571,00	110,83
2020	530.945.819.044,00	449.100.859.238,00	84,58

*Sumber: BPKAD.Sukabumi.go.id*

Dari tabel menunjukkan tingkat pencapaian belanja modal di tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yaitu adanya refocusing anggaran sebagai dampak terjadinya wabah covid 19 dan PAD masih belum optimal ditambah lagi beberapa sektor yang masih kurang maksimal sumbang PAD.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, Bagaimana Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal, dan Bagaimana pengaruh PAD dan DAK secara bersama-sama terhadap belanja modal.

## **KAJIAN TEORI**

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2017 APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Struktur APBD terdiri atas PAD, bagian dana perimbangan yan meliputi DBH,DAU,DAK, dan lain pendapatan yang sah.”

Ahmad yani (2013:51) “Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari hasil pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah”.

Berdasarkan Undang- undang No.33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut bedasarkan peraturan daerah sesuai dengan peratura perundang- undangan. Sumber- sumber PAD terdiri dari; 1) Pajak, Halim (2012:339) “ Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota”; 2) Retribusi

daerah yaitu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah mencakup Bagian laba atas BUMD, Bagian laba atas BUMN, dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok masyarakat; 4) Pendapatan daerah lain yang sah.

Menurut Raharjo Adisasmita (2014). “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.” Dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2020 Arahan DAK meliputi 2 jenis yaitu 1. Dana Alokasi Khusus Reguler yang meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga berencana, 2. Dana Alokasi Khusus Penugasan yang meliputi kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan pemukiman, irigari, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata dan lingkungan hidup. Dengan penetapan jumlah dana alokasi khusus daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai Dak yang diterima.

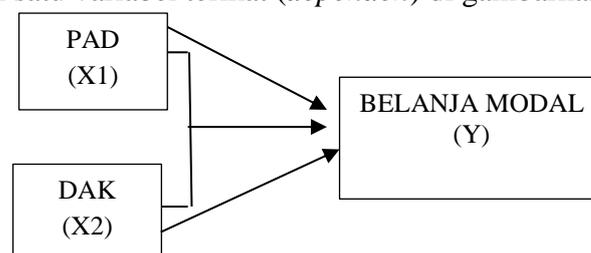
Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengatur perhitungan DAK melalui Penentuan daerah tertentu dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing. Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 kriteria, sebagai berikut; 1) Kriteria Umum yang dirumuskan berdasar kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari APBD setelah dikurangi PNSD; 2) Kriteria Khusus dirumuskan berdasarkan peraturan undang- undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; 3) Kriteria Teknis yang disusun berdasar indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah “Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

## METODE PENELITIAN

Data penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan deskriptif. Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, digunakan pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statis dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan deskriptif asosiatif.

Menurut Sugiyono (2016) paradigma di artikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel Paradigma ganda dengan dua variabel bebas (*independend*) dan satu variabel terikat (*dependen*) di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

Variabel operasional digunakan untuk memudahkan penelitian mengukur variabel yang diteliti dan mengidentifikasi kateгоре dan indeks masing- masing variabel dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Pengambilan populasi dan sampel dalam penelitian ini dari data laporan realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Sukabumi periode 2018- 2020 dengan jumlah sebanyak 12 bulan maka 3 tahun X 12 bulan = 36 data. Uji Asumsi Klasik dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda. Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan, yaitu : Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah bidang perikanan, maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Hasil dari Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	36	6,30	105,86	56,2578	30,83914
Dana Alokasi Khusus	36	,00	103,20	46,9461	35,06643
Belanja Modal	36	,00	92,45	30,7067	27,23214
Valid N (listwise)	36				

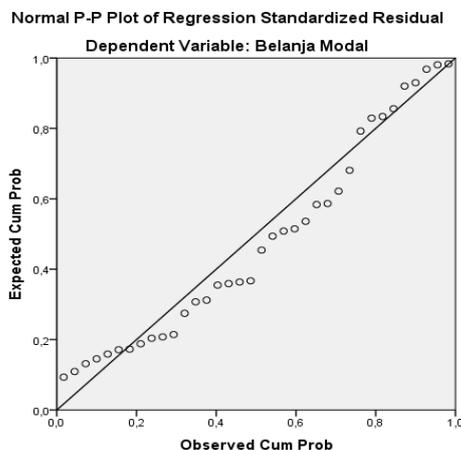
*Sumber: hasil dari pengolahan data*

Terlihat dari tabel diatas PAD sebagai variabel independen pertama memiliki nilai rata-rata 56,26% nilai tertinggi 105,86% nilai terendah 6,30% dengan standar deviasi sebesar 30,84%. DAK sebagai variabel independen kedua memiliki nilai rata-rata 46,95% nilai tertinggi 103,20% nilai terendah 0% dengan standar deviasi 35,06%. Artinya kedua variabel menunjukkan adanya variasi besar. Sedangkan Variabel dependen yaitu Belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 30,71%, nilai tertinggi 92,45%, nilai terendah 0% dengan standar deviasi sebesar 27,23%.

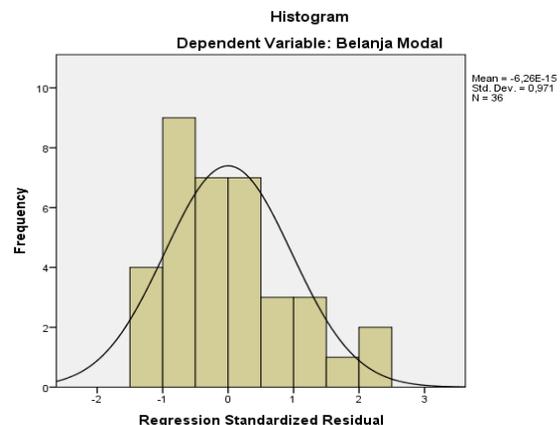
**Tabel 3.**  
**Hasil dari Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual
		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45568728
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,137
	Negative	-,087
Test Statistic		,137
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086 <sup>c</sup>

*Sumber: hasil dari pengolahan data menggunakan spss*



**Gambar 2. Grafik P-Plot Normalitas**



**Gambar 3. Grafik Histogram**

Ghozali, 2018. “Pengujian asumsi Klasik Normalitas bertujuan mengetahui apakah data dari model regresi (variabel pengganggu atau residual) berdistribusi normal atau tidak normal.” Berdasarkan tabel diatas menunjukkan secara signifikan uji normalitas  $0,086 > 0,05$  menunjukkan asumsi normalitas telah terpenuhi. Terlihat dari grafik P-Plot normalitas bahwa secara keseluruhan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal tersebut. Juga dapat dilihat dari grafik Histogram diatas menunjukkan bahwa histogram terdistribusi menurut kurva berbentuk lonceng dan tidak condong ke kiri dan ke kanan artinya data terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi Normalitas.

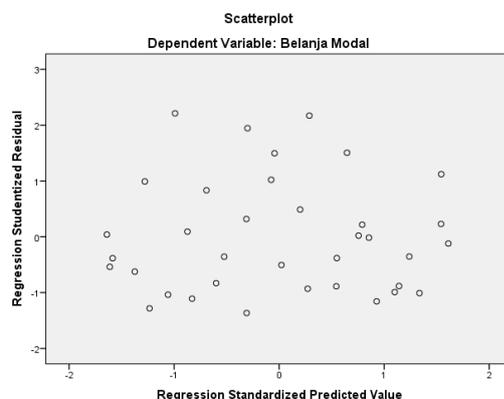
**Tabel 4.**  
**Hasil dari Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-,750	,245		-3,060	,004		
	PendapatanAsliDaerah	,838	,136	1,038	6,139	,000	,123	8,122
	DanaAlokasiKhusus	-,036	,058	-,105	-,622	,538	,123	8,122

*Sumber: hasil dari pengolahan data menggunakan spss*

Dilihat dari tabel diatas bahwa nilai tolerance dan nilai VIF memenuhi syarat secara spesifik PAD dan DAK menunjukkan nilai tolenrace sebesar  $0,123 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $8,122 < 10$  maka semua variabel didalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4. Grafik Histogram**

Dilihat dari *Scatter Plot* diatas, dapat disimpulkan bahwa titik- titik tersebar dan terdistribusi secara acak diatas dan di bawah serta tidak membentuk suatu pola, ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tanpa masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 5.**  
**Hasil dari Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,552 <sup>a</sup>	,305	,261	23,40553	1,806

*Sumber: hasil dari pengolahan data menggunakan spss*

Jadi terdapat hasil dibawah ini:

N	DL	DU	DW	4-DL	4-DU
36	1,3537	1,5872	1,806	2,6463	2,4128

Dilihat dari tabel diatas membuktikan bahwa model dalam penelitian ini bebas autokorelasi. Menurut  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  telah menunjukkan bahwa  $DU \leq D \leq 4DU$  alias  $1,5872 \leq 1,806 \leq 2,4128$ . Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat autokorelasi.

**Tabel 6.**  
**Hasil dari Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficien <sup>a</sup>		Unstandardied Coefficients		Standardied Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14,041	3,844		-3,653	,001
	Pendapatan Asli Daerah	,642	,196	,727	3,280	,002
	Dana Alokasi Khusus	,184	,172	,236	1,067	,294

*Sumber : hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 24.0*

Berikut persamaan regresi linier berganda sesuai dengan tabel diatas dalam penelitian ini :

$$Y = -14,041 + 0,642 + 0,184 + e$$

Secara statistik, nilai- nilai dalam persamaan regesi dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) Konstanta -014,041 menunjukkan prediksi rata- rata belanja modal, jika simultan PAD dan DAK adalah nol; 2) Koefisien regresi PAD bernilai positif 0,642 artinya setiap terjadi peningkatan PAD serta variabel bebas lainnya diperkirakan konsisten maka alokasi belanja modal meningkat sebesar 64,2%; 3) Koefisien regresi DAK sebesar 0,184 dan bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK dan variabel bebas lainnya diasumsikan kenaikan belanja modal sebesar 18,4%.

## Pengujian Hipotesis

**Tabel 7.**  
Hasil dari Uji t

Model		Unstandardiez coefficien		Standardiez	T	Sig.
		B	Std. Error	coefficien Beta		
1	(constant)	-14,041	3,844		-3,653	,001
	Pendapatan Asli Daerah	,642	,196	,727	3,280	,002
	Dana Alokasi Khusus	,184	,172	,236	1,067	,294

*Sumber: Hasil dari olah data menggunakan SPSS 24.0*

Dilihat dari tabel diatas dari variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,280 dengan tingkat signifikan 0,001. Nilai  $t_{hitung}$   $3,280 \geq t_{tabel}$  2,035 dan nilai sign  $0,002 \leq 0,05$  dengan taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal maka  $H_1$  diterima. Jadi Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi juga peningkatan belanja modalnya.

Berdasarkan tabel diatas dari variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,067 dengan tingkat signifikan 0,294. Nilai  $t_{hitung}$   $1,067 \leq t_{tabel}$  2,035 dan nilai sign  $0,294 \geq 0,05$  dengan taraf kepercayaan 95% bahwa  $H_2$  ditolak karna tidak ada pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

**Tabel 8.**  
Hasil dari Uji f

Anova						
MODEL		Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	23882,351	2	11941,176	190,065	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2073,282	33	62,827		
	Total	25955,633	35			

*Sumber: hasil dari pengolahan data menggunakan spss*

Dilihat dari tabel uji f diketahui nilai signifikansi 0,000 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 190,065 dengan  $df_1$  pembilang 2 dan  $df_2$  penyebut 33 sehingga diketahuin  $F_{tabel}$  3,28. Maka nilai  $F_{hitung}$   $190,065 \geq F_{tabel}$  3,28 dengan signifikan  $0,000 \leq 0,05$  sehingga dapat disimpulkan  $H_3$  diterima bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara bersama- sama (simultan) berpengaruh signifikan pada belanja modal.

**Tabel 9.**  
**Hasil dari Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,959 <sup>a</sup>	,920	,915	7,92633

*Sumber : hasil pengolahan data menggunakan SPSS 24.0*

Diketahui nilai R Square 0,920 atau 92% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal sebesar 92% dan sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan perolehan persamaan regresi, PAD menunjukkan bahwa setiap kenaikannya adalah 64,2%. PAD mempunyai peran penting dalam pembiayaan belanja daerah khususnya belanja modal. Hasil analisis menunjukkan  $t_{hitung} 3,280 \geq t_{tabel} 2,035$  dan nilai signifikan  $0,002 \leq 0,05$ . Dengan demikian kesimpulannya PAD mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan perolehan persamaan regresi DAK di tabel 4.8 sebesar 0,184 yang menunjukkan bahwa kontribusi DAK sebesar 18,4% terhadap belanja modal. Nilai ini lebih rendah dari PAD karena DAK cenderung digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu. Selain itu, dilihat dari hasil pengujian tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} 1,067 \leq t_{tabel} 2,035$  dan nilai sign  $0,294 \geq 0,05$  maka disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal**

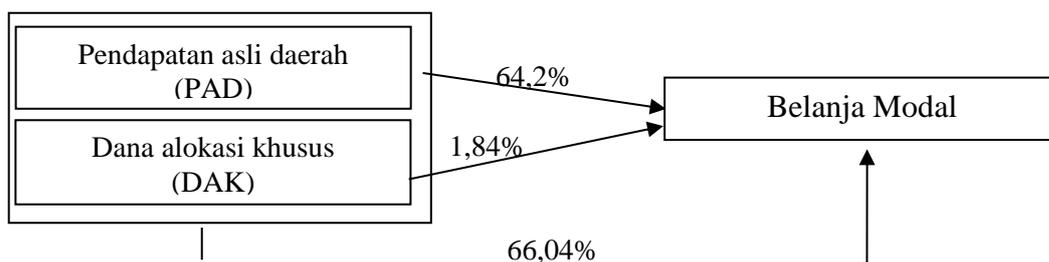
Dilihat dari Tabel 4.10, hasil pengujian menunjukkan bahwa  $F_{hitung} 190,065 \geq F_{tabel} 3,28$ , dan nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ . Dengan demikian, kesimpulannya pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terdapat pengaruh pada belanja modal secara simultan.

Berdasarkan uji koefisien yang ditentukan pada Tabel 4.11, korelasi antara PAD dan DAK terhadap belanja modal adalah 96%. Artinya terdapat pengaruh yang

kuat terhadap belanja modal antara PAD dan DAK. Angka ini berarti PAD dan DAK memiliki pengaruh yang besar pada belanja modal. Hasil pengujian koefisien determinasi PAD dan DAK memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,92 artinya PAD dan DAK berpengaruh sebesar 92% terhadap belanja modal. Sisanya yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihidung dalam penelitian ini sebesar 8%.

### Paradigma Hasil dari Penelitian

Hasil Paradigma Penelitian :



**Gambar 5.**  
**Paradigma Hasil dari Dari Penelitian**

Dari hasil penelitian ini Pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi 64,2% terhadap belanja modal. Kontribusi dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal sebesar 1,84%. yang berarti jika dana alokasi khusus yang diberikan semakin besar maka semakin banyak belanja modal yang digunakan. Dengan demikian, pendapatan asli daerah dan dana khusus menyumbang dananya sebesar 66,04% pada belanja modal.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, rahardjo 2014, *Pembiayaan Pembangunan dan Anggaran Daerah* Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ghozali, Imam 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat

- Rochmansjah, Heru dan Chabib Sholeh 2010. *Pengelolaan keuangan dan aset daerah : Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Bandung : Fokusmedia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- ....., Direktorat Jendra Perimbangan Keuangan Tahun 2017
- ....., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
- ....., Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- ....., Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2020
- ....., Standar Akuntansi Pemerintah
- ....., Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004
- <http://bpkad.sukabumikab.go.id/new/page>
- <http://djpk.kemenkeu.go.id>